

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pendidikan adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar disekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang Ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan hal ini penting, terutama dalam rangka implementasi manajemen

berbasis sekolah (MBS), yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah. Disebabkan pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana apalagi dalam berbagai kondisi perekonomian dunia yang sedang dilanda krisis.

Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya factor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang berkualitas hanya dalam angan-angan. Pemerintah menyadari betul hal ini. Ditetapkannya dana pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan mutu pendidikan Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2004:30) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Ada beberapa tujuan pendidikan yang mendasar, yaitu untuk mempersiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik individu maupun secara kolektif, sebagai warga masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Tujuan dan fungsi pendidikan lainnya adalah mencapai peradaban, artinya pendidikan bermanfaat mencapai suatu tingkat peradaban. Dalam UUD tahun 1945 pasal 31 ayat (5) dinyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Dengan pencapaian tujuan tersebut, pemerintah berupaya sedemikian rupa guna mengembangkan potensi pada dunia pendidikan. Diantaranya ialah dengan memberikan bantuan dana pada sekolah-sekolah seperti, BOS, Beasiswa, baik beasiswa kepada siswa yang kurang mampu maupun beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Selain itu juga pemerintah menggalakkan sekolah gratis bagi siswa sekolah dasar (SD), dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), serta masih banyak lagi upaya pemerintah dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pembiayaan yang dialokasikan dalam bentuk dana APBN, seperti yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Selanjutnya, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Di satu sisi dalam usaha melaksanakan tekad tersebut dan kemampuan masyarakat yang terus menurun sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah menarapkan dan mengembangkan program bantuan operasional sekolah (BOS). Program ini dikomandani oleh departemen pendidikan nasional

yang penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak yang terkait dari menteri hingga kepala sekolah pada sekolah-sekolah yang berhak menerima dana BOS.

Pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku panduan pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun oleh departemen pendidikan nasional dan departemen agama sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Setiap tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua dana yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan didalam rapat dewan sekolah, yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat, dan pemerintah daerah. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dana atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak. Berdasarkan gambaran diatas dan hasil observasi awal bahwa segala bentuk aturan dan proses pengelolaan Anggaran pembiayaan pendidikan masi banyak yang belum trasparan dan

kesulitan mengakses informasi tentang keuangan sekolah oleh karenanya peneliti mengangkat judul

“TRANSPARANSI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMA SE-KOTA GORONTALO”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transparansi Perencanaan program anggaran pembiayaan pendidikan di SMA se- kota Gorontalo?
2. Bagaimana Transparansi Penyusunan program pembiayaan pendidikan di SMA se-kota Gorontalo?
3. Bagaimana Transparansi Pelaksanaan program pembiayaan pendidikan di SMA se-kota Gorontalo?
4. Bagaimana Transparansi Pelaporan program pembiayaan pendidikan di SMA se-kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi perencanaan program anggaran pembiayaan pendidikan di SMA se- kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi penyusunan program anggaran pembiayaan pendidikan di SMA se-kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi pelaksanaan program pembiayaan pendidikan di SMA se-kota Gorontalo

4. Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi pelaporan program pembiayaan pendidikan di SMA se-kota Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi kepala sekolah, untuk dijadikan pertimbangan dalam merumuskan perencanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan Penyusunan program pengelolaan pembiayaan pendidikan,, Pelaksanaan program pembiayaan pendidikan, Pelaporan program pengelolaan pembiayaan pendidikan,
2. Bagi sekolah, melalui penelitian ini dapat memberikan informasi kepada kepala sekolah tentang transparansi pengelolaan pembiayaan pendidikan.
3. Bagi peneliti, Dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan baik dan benar. Sisi lain yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah merumuskan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMA se-kota Gorontalo.